

Karya Ilmiah

Diplomasi Publik Haji Umrah untuk ekonomi, politik dan
budaya Indonesia



Nama : Syafiuddin Fadlillah
NIDN. : [0318067702](#)

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Al-azhar Indonesia

2017

Abstrak

Penyelenggaraan ibadah haji umrah dahulu kala mampu menjadi senjata yang digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi dan budaya Indonesia yang semakin baik di level internasional, dari penyelenggaraan ibadah haji umrah, Indonesia mendapat dukungan kemerdekaan, dari ibadah haji umrah budaya Indonesia menjadi diakui dunia, karena banyaknya tokoh haji Indonesia menjadi tokoh besar di Makkah dan Madinah, hingga mampu menjadi Imam Masjidil Haram, sebuah kedudukan tertinggi di negara Arab, namun kini penyelenggaraan ibadah haji umrah terkesan hanya rutinitas dan tak mampu kembali mengangkat martabat politik, budaya dan ekonomi Indonesia menjadi semakin lebih baik di level internasional.

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik, dengan metodologi kualitatif eksplanatif. Ada banyak potensi keuntungan yang harus dioptimalkan dari penyelenggaraan ibadah haji umrah ini, dan paling tidak ada empat diplomasi publik yang bisa dilakukan dewasa ini untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik dan budaya Indonesia yang semakin baik di level internasional, yaitu diplomasi publik Mursyid dan Muthawwaif, diplomasi publik kaum cendekiawan, diplomasi publik tokoh masyarakat dan public figure dan terakhir diplomasi publik pemilik agen travel dan kaum busnismen.

DAFTAR ISI PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 . Permasalahan dan Tujuan Penelitian	4
1.3. Signifikansi	5
I.4. Teori	5
Teori Diplomasi Publik	5
I.5.. Sistematika Penulisan	16

BAB II

METODE PENELITIAN

1.1 Metodologi Penelitian	17
1.2 Jenis Penelitian	18
1.3 Gaya Penelitian	18
1.4 Bentuk Penelitian	18
1.5 Dimensi Waktu Penelitian	18
1.6 Jenis Data	18
1.7. Teknik Pengumpulan Data	19
1.8. Sumber Data	19
1.9 Metode Analisis	20
1.10. Sistematika Penulisan	20

BAB III

PENYELENGGARAAN HAJI UMROH DI INDONESIA	21
--	-----------

BAB IV

**POTENSI-POTENSI DAN EMPAT CARA UNTUK EKONOMI, POLITIK DAN BUDAYA
DARI PENYELENGGARAN HAJIUMROH**

1.1. Potensi-potensi keuntungan ekonomi, politik dan budaya	31
1.2. Empat cara meraih keuntungan ekonomi, politik dan budaya	41
1.3. Diplomasi Publik Mursyid and Muthawwif	43
1.4. Diplomasi publik kaum cendekiawan	45
1.5. Diplomasi publik tokoh dan masyarakat dan publik figure	47
1.6. Dipolamsi publik para pemilik travel dan busnisman	49
BAB V	
KESIMPULAN	51
Daftar Pustaka	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, pelaksanaan ibadah haji umrah memiliki peranan yang sangat penting, terutama saat-saat Indonesia dalam fase pergulatan mencapai kemerdekaannya, urgensi itu terlihat dari banyaknya tokoh kemerdekaan bergelar haji yang baru kembali dari tanah suci Mekkah, muncul menjadi yang terdepan melawan penjajah, mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat menggelora semangat perjuangannya setelah pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji umrah.

Sebut misalnya gerakan *sipil society* yang pertama berdiri di Indonesia, yaitu gerakan Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto, tokoh ini adalah tokoh pribumi priyai yang lebih suka menggunakan gelar haji dari pada gelar kebangsawanannya, HOS Cokroaminoto setelah melaksakan ibadah haji, dan telah banyak berinteraksi dengan tokoh dunia islam dikota suci Mekkah, juga telah mengikuti koferensi umat islam sedunia yang diadakan di Mekkah pada tahun 1926, memiliki semangat perjuangan yang sangat kuat, diantara semangatnya adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid dan sepintar-pintar siasat, organisasi ini memiliki semboyan pergerakan yang sangat revolusioner, Kerso, Koewoso, Merdiko yang berarti kuat, kuasa dan merdeka atau menang.

Lalu saat kembali ketanah air, HOS Cokroaminoto banyak dicurigai pemerintah Hindia Belanda, HOS Cokroamonoto pernah dituduh pemerintah Hindia Belanda menjadi penyebab munculnya perlawanan rakyat di Cianjur (1883) perlawanan rakyat Cilegon (1888) dan perlawanan rakyat Garut (1919). HOS Cokroaminoto terkenal sangat kuat dalam berprinsip, karenanya tidak heran kemudian orang-orang seperti Soekarno, Muso, Aidit, Kartosuwiryo dan juga Abikusno adalah orang-orang yang telah banyak belajar kepadanya.

HOS Cokroaminoto adalah salah satu contoh betapa para haji yang baru kembali ke tanah air kemudian menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah, ada banyak para alumni haji yang kemudian menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajah, dan ini menjadi catatan penting betapa haji umrah itu mampu memberi efek politik, ditandai dengan menguatnya politik pribumi yang sedang tertindas oleh para penjajah, juga ada banyak efek selain efek politik dari

pelaksanaan ibadah haji umrah untuk Indonesia, terutama efek ekonomi dan juga efek pembangunan citra dan budaya bangsa .

ISLAMIC NATIONHOOD AND COLONIAL INDONESIA



Figure 16 Tjokroaminoto with his wife and family aboard the SS Rondo en route for Jeddah, March 1926. Photograph from the album of Dr. D.G.W. van Voorthuysen (b. 1888) presented to C. Snouck Hurgronje (Or. 12.288 CSM B.2)

Karenanya setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, pemerintah Hindia Belanda mulai ketakutan terhadap para haji, lalu akhirnya membuat kebijakan melarang keberangkatan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji umrah, namun pemerintah yang baru terbentuk bertekad tetap melaksanakan ibadah haji umrah dengan mengutus misi haji khusus yang terdiri dari empat tokoh yaitu KRH. M. Adnan, H. Ismail Banda, H. Salih Suaidy dan H. Samsir Sutan Ameh, untuk menemui raja Saudi Arabia dan sekaligus untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan.

Melalui perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya keempat jamaah haji inipun bisa tiba di Saudi Arabia, lalu menemui raja Saudi Arabia sekaligus berhasil mendapat dukungan penuh Saudi dan negara-negara arab akan kemerdekaan Indonesia, keempat tokoh ini juga sukses melaksanakan ibadah haji sambil membawa bendera merah putih, dan saat di padang Arafah pada tahun 1948 itulah, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan dihadapan puluhan ribu jamaah haji seluruh dunia.

Secara budaya dan pencitraan kultur Indonesia, ibadah haji umrah juga berhasil

membawa citra negara menjadi harum, jamaah haji Indonesia telah banyak mengharumkan nama baik nusantara, itu terlihat dari kiprah para jamaah haji yang bermuqim lama di Makkah dan Madinah dan berhasil menjadi orang-orang yang terhormat dan disegani, sebut misalnya Syekh Arsyad Al-Banjari (1710-1812) yang terkenal sebagai ahli fikih dari Kalimantan dan telah menulis buku fikih perukunan melayu yang telah menjadi buku rujukan orang melayu dalam bidang fikih lebih dari 200 tahun lamanya.

Ada juga Syekh Juned Al-Betawi, dahulu seorang jamaah haji Indonesia yang kemudian bermuqim di Makkah lalu terkenal sebagai ulama ahli tauhid dan telah menulis buku *Hidayatus Shalihin* berbahasa arab. H. Aqib Suminto dalam desertasinya yang berjudul politik islam Hindia Belanda, menyebut istri syekh yang bernama Siti Rahmah, menjadi panggilan jamaah haji wanita Indonesia saat itu hingga kini, semua itu sebagai penghormatan masyarakat Saudi Arabia atas keshalihan dan kewibawaan syekh Juned Al Betawi.

Ada juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, seorang jamaah haji yang kemudian bermukim, karena kemahirannya dalam bidang agama, beliau ditunjuk menjadi imam masjidil Haram serta pengajar tetap di sana, dari beliauah Ahmad Dahlan belajar agama, dan dari beliau juga Abdul Karim Amrullah (ayahanda Hamka) dan Ismail Djambek belajar islam dan pergerakan.

Ada lagi yang membuat nama Indonesia semakin harum dan berwibawa, beliau adalah Syekh Nawawi Al Bantani seorang jamaah haji dan menjadi seorang ulama Hadist dan seorang ahli fikih dan juga mufti di Saudi Arabia, bahkan ulama Saudi Arabia menyebutnya dengan gelar *sayyidu ulama`il hadis* (tuannya ulama-ulama hadist) beliau telah menulis lebih dari 115 buku hadist, fikih dan tauhid, karenanya tak heran beliau juga ditunjuk menjadi imam tetap dan pengajar masjidil haram .

Secara ekonomi, penyelenggaraan ibadah haji umrah juga telah berhasil membuat geliat ekonomi tumbuh dengan sangat baik, bahkan saat dahulu resesi ekonomi menimpa dunia internasional, jumlah jamaah haji Indonesia tetap menjadi yang pertama dan teratas dari seluruh jamaah haji dunia, itu terlihat dari tahun 1800 hingga dewasa ini, kini jamaah haji Indonesia telah mencapai lebih dari 200 ribu pertahun, jumlah terbesar seluruh dunia, tentu pasti juga dengan dampak ekonomi yang sangat positif .

Namun dewasa ini, penyelenggaraan haji umrah cenderung hanya terbatas dengan ritual ibadah saja plus sibuk memperbaiki sistem kuota yang tak pernah beres, dan ibadah haji umrah

tak lagi banyak mampu memberi efek positif politik internasional Indonesia, efek ekonomi serta budaya Indonesia di tingkat internasional yang menguntungkan diplomasi bangsa, padahal jumlah haji Indonesia dan juga umrohnya selalu yang menjadi terbesar dan teratas dari seluruh dunia.

Tahun 2015 saja, kementerian haji Saudi Arabia mencatat telah mengeluarkan lebih dari satu juta seratus visa umroh untuk Indonesia, dan visa haji Indonesia selalu menjadi yang terbanyak dikeluarkan oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia, tak kurang dari 200 ribuan jamaah haji. Sangat disayangkan jika potensi luar biasa besar ini tak mampu memberikan keuntungan ekonomi politik dan budaya untuk Indonesia, karenanya pemerintah dan juga *sipil society* sudah seharusnya memikirkan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji umrah ini mampu memberi efek positif bagi Indonesia, baik keuntungan ekonomi, politik internasional dan juga citra budaya luhur bangsa, sebagaimana dahulu haji mampu memberi keuntungan-keuntungan politik, ekonomi dan nama baik bangsa Indonesia didunia Internasional.

1.2 . Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Jika dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, jamaah haji umrah mampu memberi peranan penting dalam membangun citra bangsa, mampu memberi manfaat politik dan ekonomi, maka kini setelah kemerdekaan Indonesia, ibadah haji umrah terkesan hanya berhenti pada ritual ibadahnya saja, serta masalah internal terutama kuota haji, ibadah haji umrah kini belum banyak memberi manfaat politik internasional, budaya dan citra Indonesia yang lebih optimal, sebagaimana dahulu ibadah haji umroh yang mampu dijadikan sebagai diplomasi pemerintah dan juga publik guna mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi, politik dan budaya Indonesia ditingkat internasional.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi menjadikan penyelenggaraan ibadah haji umrah yang telah melibatkan jutaan publik, menghabiskan triliunan rupiah menjadi senjata dan amunisi lain pemerintah untuk mewujudkan kepentingan ekonomi politik dan budaya Indonesia, sebagaimana dahulu sebelum kemerdekaan diplomasi publik model ini pernah sukses dan berhasil diwujudkan.

Karenanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, **bagaimana menjadikan penyelenggaraan ibadah haji umrah sebagai diplomasi publik Indonesia yang mampu mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi, politik dan budaya negara?**

1.3. Signifikansi

Penelitian ini akan merekomendasikan kepada pihak terkait terutama kementerian Luar negeri dan Kementerian Agama untuk segera mengeluarkan sebuah kebijakan, bagaimana potensi haji umrah yang selalu menjadikan Indonesai menjadi nomor satu, baik nomor satu dari segi jumlah dan angka, agar kemudian bisa digunakan untuk mendulang keuntungan ekonomi, politik dan citra budaya internasional Indonesia yang lebih positif.

1.4. Teori

Teori Diplomasi Publik

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan -kebijakan yang diambil oleh negaranya (Tuch, 1990: 3; Gouveia, 2006: 7-8, dikutip J. Wang, 2006). Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekon omi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sementara itu, Jan Mellisen (2006) mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.

Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power. Jika dibandingkan, ada tiga perbedaan antara diplomasi publik dengan

diplomasi yang sifatnya resmi (tradisional).

Pertama, diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya. Ketiga, tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi (jalur pertama) ada pada perilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik. Dalam diplomasi publik, perlu dipahami bahwa proses diplomasinya tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri.

Evan Potter (2006) mengatakan bahwa permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional. Esensi dari diplomasi publik adalah 'membuat orang lain berada di pihak anda', sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga khalayak atau publik.

Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antarnegara.

Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antarnegara (McDonald, 1991: 220-221). Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak (Fulton, 1998 dikutip Djelantik, 1994). Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi

publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional.

Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antarpemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri.

Diplomasi publik kembali dibicarakan terutama pasca tragedi 9/11 pada 2001. Akan tetapi, sebenarnya diplomasi publik telah dipraktikkan jauh hari sebelumnya. Diplomasi publik muncul setelah Perang Dunia I dan mendominasi pada masa Perang Dingin.

Istilah yang digunakan saat itu adalah `democratic diplomacy` (Fisher, 1972: 4 dikutip J. Wang, 2006). Pasca 1945, negara-negara Eropa banyak menerapkan diplomasi publik. Negara-negara di benua ini merupakan negara-negara yang paling awal dan paling banyak menggunakan model diplomasi publik. Beberapa contoh misalnya pada saat kemunculan negara-negara. Bahkan tahun 1990, atau jika ditarik ke belakang contoh kemunculan Republik Federal Jerman tahun 1949. Perancis menerapkan diplomasi *politique d'influence* dengan sasaran pada publik luar negeri guna pemulihan citra setelah kekalahannya pada dua perang dunia. Belanda menerapkan *publieksdiplomatie avant-la-lettre* dalam mengusung isu-isu moral jauh sebelum perang dingin berakhir.

Penyebutan diplomasi publik sendiri muncul pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University dalam penelitiannya mengenai program-program internasional dan budaya Amerika Serikat (Fisher, 1972: 4 dikutip J. Wang,

2006). Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik manca. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepankan.

Strategi Komunikasi dalam Diplomasi Publik Diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah. Karakteristik dunia seperti ini membutuhkan manajemen informasi untuk menyatukan masalah-masalah domestik dan luar negeri. Dengan begitu, diplomasi publik termasuk mengoptimalkan aktivitas komunikasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi demi kepentingan negara. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Menteri Luar Negeri AS, George Shultz, bahwa bahan baku diplomasi adalah informasi; bagaimana memperolehnya, menganalisis, dan memampukannya dalam sistem (Schultz, 1997 dikutip Djelantik, 1994).

Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai konsep yang sifatnya multi dimensi dan mencakup tiga tujuan utama, yaitu: (1) mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, (2) bentuk komunikasi nilai dan sikap, serta (3) sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan mutual trust antara negara dan masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, diplomasi publik menekankan pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai bentuk partisipasi, perlu dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi publik, yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam seperti misalnya menggunakan kelompok-kelompok non-negara (MNC, NGO) dan strategi komunikasi di luar

dengan kelompok sasaran publik manca. Selanjutnya Christopher Ross (2003), Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang harus dipahami agar diplomasi publik yang dilakukan bisa berhasil, dalam artian dapat memenuhi tujuannya dalam menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi publik manca (to inform, engage, and influence). Pertama, ada koordinasi kebijakan pada tataran nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam, dan semuanya ditujukan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasional suatu negara.

Untuk itu, harus dipastikan terlebih dulu bahwa publik manca memahami betul kebijakan yang diambil. Harus dipastikan pula bahwa sumbernya berasal dari pemerintah, bukan yang lain. Diplomasi publik pada tataran nasional perlu dikoordinasikan pada tataran pemerintah mengingat beragamnya jenis pesan, bahasa, kelompok sasaran, format, dan media. Koordinasi penting dilakukan agar prioritas atas informasi dan pemahaman tema menjadi jelas; pesan yang akan disampaikan adalah konsisten; dan sumber - sumber yang digunakan adalah efektif. Kedua, mesti ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu kebijakan. Ketiga, pesan yang akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsisten, kredibel, dapat dipercaya, dan benar. Perlu dipahami bahwa publik yang menjadi sasaran diplomasi publik adalah beragam.

Maka, hal yang dapat diandalkan adalah kredibilitas - what we mean and mean what we say. Keempat, menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan untuk suatu publik tertentu. Mengingat perkembangan ICT (Information Communication Technology), maka pesan itu juga harus didesain secara cepat. Kevakuman informasi akan memunculkan pesan yang datang dari sumber di luar pemerintah. Kelima, karena kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan beragam, maka perlu memanfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti

internet, broadcasting, publikasi cetak, press placements, travelling speaker, atau pertukaran pendidikan dan budaya. Keenam, memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor -sektor swasta dan aktor nonnegara lainnya. Ketujuh, perlunya dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman melalui komitmen dan dialog.

Selain ketujuh pilar tersebut, diplomasi publik juga memiliki tiga tingkatan komunikasi (Anholt, 2006: 5-6) yaitu: (1) perangkat diplomasi publik 'menjual' apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) 'menjual' kebijakan pemerintah, namun dengan kewenangan untuk mengondisikan model dan isi kebijakan luar negerinya, (3) menempatkan sebagai instrumen kebijakan, bukan pada metode komunikasi kebijakan. Dalam tahapan ini banyak digunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft power dibanding hard power dalam mengubah pemahaman dan perilaku kelompok sasaran.

Mengingat bahwa tidak ada bentuk standar dalam diplomasi publik, diplomasi publik dikenal sebagai tailor made diplomacy. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan strategi komunikasinya (Melissen, 2006: 11 -14), yaitu: (1) Dalam pembentukan dan penerapannya, diplomasi publik selalu disesuaikan dengan keadaan setempat dan kasus -kasus tertentu. Terkadang apa yang dianggap wajar di suatu negara belum tentu wajar di negara lain. Misalnya: narkoba dan euthanasia dapat dijadikan bahan dalam diplomasi publik di Belanda, tetapi tidak dapat diterapkan di Turki atau AS. (2) Diplomasi publik dapat dijadikan jembatan untuk mengisi gap antara budaya-budaya radikal, tapi harus diperhatikan bahwa penerapannya hanya bisa berlaku ketika hubungan saling ketergantungan secara ekonomi ada atau antar masyarakat yang dalam beberapa tingkatan saling terkait, misalnya masyarakat Uni Eropa. (3) Diplomasi publik dapat berjalan pada sistem komunikasi dua arah.

Pada sistem satu arah, diplomasi publik sulit dilakukan. Sebagai analogi, diplomasi

publik mirip dengan teknik-teknik marketing. Diplomasi publik diawali dengan persepsi dan kepercayaan yang ada sebelumnya di diri 'konsumen'. Untuk menjembatani informasi tersebut, langkah-langkah seperti penginformasian negara lewat brosur, majalah, film, DVD, dan CD bisa dilakukan. Teknik-teknik dasar diplomasi publik seperti ini terkadang sering diabaikan oleh Deplu. Bagi pelopor diplomasi publik seperti AS, UK, dan Kanada, disadari bahwa pengarusutamaan diplomasi publik ke dalam politik luar negeri memerlukan kesabaran dan dukungan dari level yang lebih tinggi. (4) Berusaha menyewa jasa konsultan untuk melakukan diplomasi publik. Tapi, hal tersebut tidak lantas dapat menggantikan kemampuan staf-staf diplomatik yang ada selama ini. Hasilnya akan berbeda. Diplomasi publik merupakan jenis DIY – a do it yourself business-. Exercising Soft Power dalam Kerangka Diplomasi Publik Soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang dimau dengan menarik perhatian atau mempengaruhi pihak lain agar mau mengadopsi tujuan-tujuan negara-negara yang menggunakan soft power tersebut. Model exercise soft power dalam diplomasi publik yang dianggap berhasil pada saat Perang Dingin adalah AS. Nilai-nilai AS seperti demokrasi dan HAM dapat membendung nilai-nilai sosialis yang diusung oleh Uni Soviet. AS juga memiliki industri budaya melalui film dan musik yang ditemukan di seluruh dunia dan mempengaruhi perilaku anak muda di seluruh dunia. Bersama-sama dengan kemampuan hard power-nya, AS muncul sebagai kekuatan utama dunia. Lebih dari 50 persen pemimpin dunia; lebih dari 200 orang adalah pemimpin dan bekas pemimpin negara; 1500 orang pada tingkat menteri dan anggota kabinet; dan banyak pemimpin perusahaan dan sektor-sektor swasta lainnya saat ini, dulunya adalah peserta program pertukaran budaya dan pendidikan di AS (Ross, 2003). Kemampuan tersebut kemudian menurun ketika harus dihadapkan pada permasalahan war on terrorism, khususnya pada negara-negara dengan penduduk muslim besar. Informasi yang

diusung melalui diplomasi publiknya di negara-negara muslim tidak diikuti dengan penerapan di lapangan, kredibilitasnya kemudian dipertanyakan. Sikap memusuhi negara muslim seperti Irak dan Iran dengan penyebutan poros setan, red tape dalam pengurusan visa, pengontrolan yang sangat ketat terhadap warga muslim kemudian menurunkan citra AS, mendorong sentimen anti-AS, melemahkan dukungan masyarakat internasional, dan memunculkan pengalihan dukungan dunia terhadap kekuatan-kekuatan baru selain AS. Contoh penerapan diplomasi publik dalam kerangka soft power lainnya adalah Cina. Cina dengan keberhasilan pembangunan ekonominya kemudian populer di kalangan negara-negara berkembang. Cina berhasil mencitrakan dirinya bahwa rezim yang tidak demokratis dapat membangun perekonomiannya. Konsep Konsensus Beijing yang memadukan model otoritarian dan ekonomi pasar menjadi populer jika dibandingkan konsep Konsensus Washington yang memadukan demokrasi dengan ekonomi liberal (Nye, 2007: 4). Secara militer dan ekonomi, Cina tidak bisa dibandingkan dengan AS. Cina tidak punya industri budaya sebesar Hollywood dan universitasnya tidak semaju AS. Cina juga memiliki jumlah NGO yang minim jika dibandingkan AS. Secara politik, Cina mengalami masa-masa korupsi, inequality, kurangnya iklim demokrasi, permasalahan HAM, dan sulitnya penegakan hukum. Dengan semua permasalahan tersebut, Cina membuktikan dapat bangkit menjadi satu kekuatan besar dunia. Hal ini yang menyebabkan Konsensus Beijing banyak ditiru dan menarik perhatian negara-negara otoritatif dan semi otoritatif. Melihat dua hal di atas, dalam pandangan Nye, kerangka soft power yang potensial untuk di-exercise adalah pertukaran pendidikan, broadcasting, developing assistance, pertukaran militer, dan disaster relief. Perkembangan ICT sebagai Modal.

Diplomasi Publik sebagai Instrumen Politik Luar Negeri dikatakan di awal bahwa perkembangan diplomasi publik dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu perubahan isu dan agenda

internasional, berkembangnya aktor-aktor non-negara, dan perkembangan media komunikasi dan informasi. Esensi dari diplomasi publik tidak berubah dari awal kemunculannya setelah Perang Dunia I. Tetapi dalam tataran tujuan, instrumen, dan aktor, cakupannya menjadi semakin luas. Diplomasi publik kemudian masuk dalam instrumen politik luar negeri dan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam politik internasional (Leonard, 2002). Untuk saat ini, diplomasi publik mengalami masa pencerahan, muncul globalisasi dalam diplomasi publik. Indonesia memiliki departemen diplomasi publik di bawah Departemen Luar Negeri; Turki menaikkan anggaran US\$ 25 juta untuk diplomasi publiknya; Cina mendirikan banyak lembaga yang berhubungan dengan hubungan budaya di banyak kota di dunia. (de Gouveia, 2006:8). Hubungan antara diplomasi dan politik luar negeri erat kaitannya. Politik luar negeri mengalami dua tahapan dalam prosesnya, yaitu pada tataran pembuatan dan implementasi kebijakan. Diplomasi merupakan salah satu instrumen dimana keputusan atau kebijakan diimplementasikan (White, 1997: 257). Dalam pengertiannya yang luas, diplomasi tidak hanya menyangkut pada tataran implementasi, tapi juga proses pembuatan kebijakan. Hal ini terkait dengan fungsi dari diplomasi itu sendiri yang menyangkut pengumpulan informasi, pemberian saran terhadap kebijakan, perwakilan, negosiasi, dan jasa-jasa konsuler (White, 1997:258). Lalu, bagaimana dengan diplomasi publik sendiri? Pembuatan kebijakan luar negeri didominasi oleh elit, tapi dalam pengumpulan informasi dan pertimbangan-pertimbangan, pembuatannya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar negara, seperti swasta dan NGO. Aktor non-negara sebagai publik selanjutnya tidak hanya terlibat dalam proses implementasinya, tapi juga dalam hal perumusan kebijakannya. Ke depan, peranan diplomasi publik sebagai instrumen politik luar negeri semakin mengemuka. Philip Fiske de Gouveia (2006) mengindikasikan ada delapan prediksi mengenai masa depan diplomasi publik. (1) Mengemukanya soft power. Soft power

dalam exercise-nya tidak didominasi oleh elit, tapi dapat melibatkan publik lebih banyak. (2) Munculnya komunikasi yang bersifat agresif dan lebih kompetitif. Ketika setiap negara mulai mengkomunikasikan kebaikan-kebaikan negaranya dan apa yang bisa ditawarkan, maka informasi yang muncul menjadi bias dan yang terjadi adalah bentuk komunikasi yang negatif dan agresif. (3) Meskipun di satu sisi, diplomasi publik menjadi agresif dan kompetitif, tapi di sisi lain hal ini juga menumbuhkan kerjasama. Ketika masing-masing negara bersaing satu sama lain dalam hal diplomasi publik dan strategi komunikasinya, maka di satu sisi hal ini semakin menumbuhkan kerjasama. Misalnya Uni Eropa atau ASEAN, dalam beberapa isu negara-negara anggota bekerjasama yang bertujuan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan dampak yang ditimbulkan apabila bekerja sendiri seperti dalam isu HAM, lingkungan, atau penyakit. Perlu diperhatikan bahwa kerjasama tersebut tidak akan bisa berjalan ketika pada satu isu yang sama, kepentingan masing-masing negara anggota saling tumpang tindih. (4) Media global tidak lagi didominasi oleh media barat. (5) Diplomasi publik yang dilakukan di dalam negeri harus seiring dengan diplomasi publik yang dilakukan di luar negeri. (6) Diplomasi publik tidak lagi otoritas pemerintah. Diplomasi publik sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan konsultan yang mengatasnamakan pemerintah. (7) Teknologi memiliki peranan dalam mempengaruhi pembuatan, pengukuran keberhasilan, dan evaluasi pelaksanaannya. (8) Diplomasi publik dan strategi komunikasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan global yang sifatnya non-politis. Selanjutnya, ada beberapa alasan pemberian prioritas dalam penerapan diplomasi publik, yaitu: (1) Diplomasi publik memiliki efek jangka panjang terhadap tujuan-tujuan politik luar negeri. (2) Diplomasi publik dapat meningkatkan ekspor suatu negara dan investasi asing. Hal ini biasa terjadi pada negara-negara berkembang. (3) Menunjukkan eksistensi bagi negara-negara yang memiliki power lemah di tataran dunia, misalnya Norwegia.

(4) Membantu beberapa negara untuk mengartikulasi identitas nasionalnya, seperti Kanada. (5) Sebagai bentuk komitmen suatu negara atas situasi dunia yang stabil dan tata dunia multilateral yang damai. (6) Membantu dalam mereduksi stereotipe yang salah atas suatu negara, misalnya realitas negara -negara Balkan. (7) Sebagai bentuk counter atas pemberitaan negatif suatu negara akibat krisis domestik yang menyimpannya¹

¹ Jurnal Diplomasi publik dalam politik luar negeri, Citra Hennida, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

I.5.. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi penelitian ini menjadi lima bab topik atau pembahasan, juga sekaligus agar rumusan masalah dalam penelitian ini bisa tergambar dalam sistematika penulisan, berikut ini sistematika penulisan penelitian ini:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Metodologi penelitian

Bab III : Penyelenggaraan ibadah haji umrah Indonesia

Bab IV : Potensi dan empat cara mewujudkan haji umrah sebagai diplomasi publik yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi politik budaya bangsa

Bab V : Kesimpulan

BAB II

METODE PENELITIAN

III.I Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian maka seorang peneliti akan dipaksa untuk menggunakan metode-metode tertentu guna memastikan penelitiannya tersebut sudah sesuai dengan standar dan teknik penulisan ilmiah, disamping itu juga, agar data-data yang disampaikan benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan serta memastikan keakuratan data serta memastikan teknik penguraian dan validasi data sudah bisa diterapkan².

III.II Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian eksplanatif dimana peneliti akan menjelaskan bagaimana teknik diplomasi publik hajiumrah yang bisa mendatangkan keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa dilevel internasional, sebab selama ini pelaksanaan ibadah hajiumrah tidak lagi seperti masa awal kemerdekaan dahulu yang dijadikan sebagai senjata melawan musuh dan sekaligus senjata untuk meraih kemerdekaan, secara budaya, banyak tokoh Indonesia yang meraih tempat ditanah suci yang mereka itu adalah jamaah haji dan umrah, namun kini penyelenggaraan ibadah hajiumrah hanya fokus pada masalah teknis dan tidak lagi menjadi tempat mencari potensi keuntungan pembangunan politik ekonomi dan budaya bangsa dilevel internasional.

III.III. Gaya Penelitian

Metodologi kualitatif akan penulis pilih menjadi gaya penelitian tentang diplomasi publik hajiumroh untuk keuntungan politik ekonomi dan budaya Indonesia dilevel Internasional, sebab metodologi kualitatif adalah gaya penelitian yang sangat cocok untuk disiplin ilmu sosial, termasuk juga disiplin ilmu hubungan internasional, apalagi tema yang diangkat dalam penelitian

² Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong, Remaja Rosda press, Bandung, 2006

ini adalah tentang bagaimana menemukan solusi dari penyelenggaraan ibadah haji untuk keuntungan ekonomi, politik dan budaya Indonesia di level internasional

III.IV. Bentuk Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian *library research*³, dalam penelitian yang menggunakan data kepustakaan, maka data-data dari informasi buku, koran, jurnal baik elektronik ataupun cetak, majalah serta data-data berita online akan menjadi data utama penelitian ini, data-data ini kemudian akan diolah untuk menguatkan hasil-hasil penelitian. Saat ini banyak informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji baik yang penulis alami sendiri ataupun dari informasi berita online terpercaya yang langsung meliput seperti berita online Aljazeera dan beberapa sumber berita online lainnya.

III.V Dimensi Waktu Penelitian

Penelitian tentang diplomasi publik haji untuk memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa ini akan mengambil periode dari tahun 1999 saat pertama kalinya undang undang haji keluar dan dikonsentrasikan penyeenggaraanya di departemen agama didirektorat haji, mulai saat itu keterlibatan instansi lain hampir tak pernah terjadi dan secara teknis setelah keluarnya undang undang ini memang pelaksanaan haji lebih tertib, namun nilai besar dan cita cita besar negara kemudian bukan menjadi prioritas, penyelenggaraan haji kini hanya fokus pada teknis ibadah dan kemudian melupakan potensi politik ekonomi dan budaya bangsa,.

III.VI Jenis Data

Penggunaan data-data kualitatif seperti buku-buku, jurnal baik yang cetak ataupun online, artikel serta website online terkait dengan masalah diplomasi publik haji untuk

³ Metode Penelitian Kualitatif, . Conny R. Semiawan, Grasindo press, Jakarta, 2000.

memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam penelitian ini, sebagai bagian dari validitas dan penguatan data, data-data yang ada dalam buku, artikel serta juga wawancara tokoh akan dikemas dan dijadikan bahan, ada banyak wawancara tokoh terkait dengan diplomasi publik haji umrah untuk memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa, data-data wawancara yang relevan ini nanti akan digunakan untuk menguatkan data penelitian ini.

III.VII. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bagian dari bentuk pengumpulan data yang bersifat *liberary research*⁴ maka penulis akan mencari informasi terkait dengan dua hal penting, yang **pertama** akan mencari tentang data diplomasi publik haji umrah untuk memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa sebelum keluarnya peraturan no 3 tahun 1999, lalu **kedua** akan mencari data terkait dengan diplomasi publik haji umrah untuk memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa sesudah keluarnya peraturan no 3 tahun 1999

III.VII. Sumber Data

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang terdapat dalam buku-buku, jurnal media yang terkait dengan masalah diplomasi publik haji umrah untuk memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa dan data yang digunakan dalam penelitian ini juga nanti adalah wawancara beberapa tokoh Indonesia terkait dengan diplomasi publik haji umrah untuk memperoleh keuntungan politik ekonomi dan budaya bangsa, wawancara-wawancara tersebut telah dilakukan oleh beberapa media diantaranya adalah media online Republika dan media online Aljazeera yang memuat wawancara tokoh dimaksud

⁴ ibid

III.VIII. Metode Analisis

Metode eksplanatif adalah model yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana kondisi dan gambaran penyelenggaraan ibadah haji umrah⁵, lalu bagaimana pelaksanaan ibadah ini yang memiliki potensi keuntungan yang sangat luar biasa banyak dan dari potensi itu bagaimana menariknya menjadi keuntungan keuntungan politik, ekonomi dan budaya bangsa yang semakin positif di dunia internasional.

III.IX. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini seperti pada penulisan umumnya akan menjelaskan di bab satu tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian serta signifikansi penelitian. Pada Bab dua dari penelitian ini akan membahas tentang teori diplomasi publik sebagai teori yang akan digunakan dalam menganalisa nanti. Dan di bab tiga akan menulis tentang metodologi penelitian yang akan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan metode dan pengolahan data penelitian, dan di bab empat akan penulis paparkan pembahasan tentang potensi dan empat cara diplomasi publik memperoleh keuntungan ekonomi budaya dan politik negara.

⁵ Studi Kasus Desain dan Metode, Robert K. Yin, Grafindo Persada, Jakarta, 2004

BAB III

PENYELENGGARAAN HAJI UMROH DI INDONESIA

Ibadah haji adalah ibadah yang sangat klasik dimulai sejak diutusny nabi Ibrahim AS sekitar tahun 2.166 sebelum Masehi, mulai saat itulah ibadah ini mulai dilakukan oleh manusia, tidak ada catatan sejarah yang menyebut bagaimana pelaksanaan ibadah ini saat masa-masa sulitnya transportasi, namun dari keterangan kitab suci didapatkan perjalanan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jalan kaki dan kedua menggunakan onta, sebab onta adalah binatang terkuat di tanah arab, mampu bertahan tanpa makan dan minum sebab ia memiliki persediaan dan penyimpanan makanan dan minuman dalam tubuh.⁶

Di Indonesia sendiri pelaksanaan ibadah haji mulai dikenal sejak islam masuk ke nusantara pada abad 13-an masehi, namun belum ada peraturan negara yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji ini hingga kemudian muncul resolusi penjajah pemerintah Belanda pada tahun 1825 tentang ibadah haji, lalu Ordonansi tahun 1859 dan Ordonansi tahun 1922 dan hampir semua peraturan ini menjelaskan tentang aturan teknis melaksanakan ibadah haji umroh.

Diterbitkannya undang undang haji pada masa kolonial sebenarnya lebih ditujukan untuk membendung gerakan perlawanan rakyat, sebab dari pelaksanaan ibadah ini muncul pejuang pejuang kemerdekaan yang merepotkan pemerintah Hindia belanda, itulah sebabnya peraturan dikeluarkan bukan untuk memaksimalkan bagaimana suksesnya ibadah ini, namun peraturan dikeluarkan lebih untuk mengawasi gerakan perlawanan rakyat Indonesia⁷

Dari peraturan dan undang undang haji yang disahkan pemerintah Indonesia, sebagian besar atau mayoritas perundangan undangan ini berbicara tentang teknis perjalanan haji umrah

⁶ Lihat QS Al-Hajj ayat 17 tentang seruan nabi ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji

⁷ Lihat Politik Islam Hindia Belanda H. Aqib Suminto, 1985, LP3ES, Midas Surya Grafindo, Jakarta

jamaah, sama sekali tidak melihat haji sebagai diplomasi yang diintegrasikan dengan kementerian luar negeri dengan menjadikan hajiumrah sebagai diplomasi publik RI untuk kepentingan pembangunan citra politik internasional Indonesia, juga belum terintegrasikan dengan kementerian perdagangan untuk mencari potensi ekonomi RI terutama dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah-daerah RI sebab jamaah haji dan umroh pesertanya adalah seluruh daerah Indonesia dengan terbaginya kuota haji ke seluruh daerah Indonesia, juga belum terintegrasikan dengan kementerian pendidikan sebab dari pelaksanaan haji dan umroh ini ada potensi pemberian potret budaya Islam Nusantara yang berkembang didalamnya beragam paham dan pemikiran namun tetap rukun damai dalam kesatuan negara Indonesia .

Peraturan pertama tentang ibadah hajiumrah adalah yang lebih detail dan rinci telah diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Ordonansi tahun 1922 tentang peraturan pelayaran haji yang memuat 10 bab dan 74 ayat hingga kemudian terbit undang-undang no 17 tahun 1999 dan disusul dengan banyak penyempurnaan undang-undang haji umroh hingga dewasa ini.

Dari semua undang-undang yang dikeluarkan pemerintah ini, fokus pemerintah lebih pada teknis pendaftaran, keberangkatan, mekanisme penentuan biaya ongkos haji setiap tahun hingga pengaturan saat jamaah sedang berada di tanah suci, yaitu dengan terbaginya jamaah menjadi dua kloter yaitu kloter pertama dan kloter kedua, lalu aturan mengenai teknis penanggulangan kesehatan jamaah.

Disamping mayoritas jamaah haji yang dikelola pemerintah, swasta juga diberikan jatah pengelolaan pemberangkatan sekitar 10 persen dari total visa yang diberikan pemerintah Saudi Arabia kepada pemerintah Indonesia, jatah 10 persen ini lalu dibagi keseluruhan biro travel haji umroh resmi yang telah diakui pemerintah.

Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah umroh pemerintah menyerahkannya kepada pihak swasta secara penuh mulai dari pendaftaran hingga kepulangan, pemerintah hanya memberi himbauan-himbauan serta memberikan mediasi jika terjadi konflik atau masalah jamaah umroh dengan biro perjalanannya, walau ada wacana yang menyebut pemerintah berencana akan mengambil sebagian jatah umroh yang akan dikelola oleh pemerintah, namun rencana ini ditolak pihak swasta dan akhirnya keinginan pemerintah ini kemudian tertunda.

Untuk pelaksanaan ibadah Umroh pemerintah menyerahkannya kepada pihak swasta yang tergabung dalam asosiasi asosiasi haji umroh yang berjumlah sekitar 600-an travel penyelenggara ibadah umroh, sama dengan ibadah haji, undang undang pelaksanaan ibadah umroh juga lebih pada pengaturan teknis keberangkatan dan kenyamanan jamaah, dan secara teknis terlihat jamaah terlayani dengan baik, juga tergantung jamaah memilih level pelayanan yang ditawarkan oleh masing masing agen perjalanan ibadah haji umroh ini. namun tetap saja pembanguna tiga aspek prespektip politik, budaya dan ekonomi nasional didunia internasional masih belum terlihat.

Jika melihat Ordonansi haji tahun 1922 maka sangat terlihat betapa pemerintah Hindia Belanda saat itu fokus mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji mulai dari pemberian ijin kapal pengangkut jamaah haji hingga tanggung jawab kesehatan yang harus mendapat persetujuan pemerintah Hindia Belanda, tak menyinggung sedikitpun tentang pembangunan politik nasional didunia internasional hingga tak ada upaya pembangunan ekonomi budaya nasional di tingkat dunia.

Pada bab satu dari peraturan ini pemerintah Hindia Belanda mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji secara umum lalu dibab duanya mengatur tentang standar kapal haji, bab tiga tentang sertifikasi haji, pendidikan dan daftar ukur kapal, bab empat mengatur tentang surat

bukti tempat bagi agen haji, bab lima tentang penyelidikan kesehatan penumpang beserta barang barang daftar penumpang dalam kapal dan buku kesehatan.

Peraturan pada bab enam mengatur tentang pemberangkatan kapal haji dari pelabuhan terakhir, lalu bab tujuh tentang peraturan kapal haji saat diatas lautan, lalu peraturan mekanisme saat kedatangan kembali di negara asal, kemudian tentang ketentuan ketentuan umum pada bab sembilan dan bab sepuluh tentang penutup undang undang ini⁸.

Begitu juga tentang peraturan haji yang terbitkan setelah adanya undang undang haji mulai dari akhir tahun 1900-an hingga kini, sebagian besar mengatur teknis yang tak pernah tuntas, misalnya undang-undang haji nomor 13 tahun 2008 yang disahkan pada era presiden SBY dan berlaku hingga kini, undang undang ini berisi tujuh belas bab dan 69 pasal, bab satu berisi tentang peraturan umum ibadah haji tentang pengertian dan defenisi, lalu pada bab dua berisi tentang asas dan tujuan, lalu pada bab tiga memuat tentang hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dan hanya fokus pada pendampingan dihotel saat saat ibadah serta kenyamanan transportasi, bab empat tentang pengorganisasian.

Bab lima memuat tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, bab enam tentang pendaftaran dan kuota, bab tujuh tentang pembinaan, pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan fisik sebagaimana pasal 29 dan 30 menjelaskannya, lalu di bab tujuh mengatur tentang kesehatan jamaah, bab sembilan tentang keimigrasian, bab sepuluh tentang transportasi, bab sebelas tentang akomodasi atau pemondokan di tanah suci, dan bab sebelas mengatur tentang ibadah haji khusus dan disusul dengan penggunaan dana abadi umat, pidana haji dan peraturan peralihan⁹.

Jika mengacu pada dua undang undang haji ini maka dapat dipastikan bahwa peraturan

⁸ Lihat berhaji dimasa kolonial, M.Dien Majid, 2008, CV Sejahtera Jakarta.

⁹ Lihat undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang pelaksanaan ibadah haji, dikemengonline

ini sangat kuat dan sangat bagus mengatur tentang teknis keberangkatan hingga kepulangan jamaah haji menjamin keselamatan akomodasi dan transportasi disana walau masih saja ada kekurangan, namun peraturan ini tidak memuat tentang tiga potensi besar dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini yaitu bagaimana menjadikan jamaah sebagai diplomat publik yang akan memperkuat politik budaya dan ekonomi internasional Indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari undang undang nomor 17 tahun 1999 mengatur tentang jamaah haji umrah saat ditanah suci hanya dalam satu bab dan dua pasal yaitu pasal 29 dan 30 padahal jamaah haji dan umrah adalah para diplomat publik negara yang jika dioptimalkan bisa menjadi kekuatan politik ekonomi budaya Indonesia dilevel internasional, karenanya tidak cukup mengaturnya dalam satu bab dan dua pasal.

Terlebih dua pasal yang dimaksud lebih pada pembinaan manasik dan ibadah di tanah air dan juga ditanah suci, bunyi dari bab enam itu adalah dalam pasal 29 disebut dalam rangka pembinaan ibadah haji menteri menetapkan pertama, mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji, pedoman pembinaan, tuntunan manasik dan panduan perjalanan ibadah haji. Kedua , pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat diatas dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari jamaah haji diluar BPIH yang telah ditetapkan.

Pada pasal 30 disebut bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan, maupun dengan membentuk kelompok bimbingan, lalu dilanjutkan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan ibadah haji akan di atur dengan peraturan menteri.

Dari pengalaman penulis membimbing jamaah maka sangat sedikit sekali keterlibatan pemerintah menjadikan ibadah hajiumrah ini sebagai diplomasi publik yang bisa menguatkan

politik, budaya dan ekonomi negara menjadi semakin baik di level internasional karena ibadah ini adalah ibadah yang interaksinya dengan dunia internasional sangat kuat dan masif, pengalaman penulis saat membimbing ibadah haji dan umroh, jamaah haji dan umroh Indonesia lebih terkesan eksklusif dan tertutup, eksklusif karena jamaah haji dan umroh hanya mau bergaul dengan rombongannya saja atau dengan kelompok keberangkatannya di satu travel dan terkesan malas berinteraksi dengan jamaah lain diluar kloter dan groupnya. Jamaah Indonesia juga terkesan tertutup, jamaah Indonesia sangat jarang bersosialisasi dengan jamaah diluar negaranya, jikapun berinteraksi hanya sebatas menjawab ucapan salam dan senyum saja dan bertanya tentang negara asal dan setelah itu selesai.

Diantara sebab munculnya sikap eksklusif dan tertutup adalah karena saat keberangkatan dari Indonesia jamaah haji umroh sudah terbangun ikatan yang kuat antar sesama kloter dan group travelnya yang sangat masif, dan itu dibiarkan oleh penyelenggara sebab memang tak ada aturan atau tak ada tujuan bersama yang ingin dicapai saat tiba di tanah suci selain beribadah, jika dibangun oleh pemerintah akan adanya kesadaran bahwa jamaah adalah diplomat publik negara yang memiliki tujuan-tujuan mulia untuk membangun politik budaya dan ekonomi negaranya maka sangat bisa dikondisikan jamaah haji umroh untuk mewujudkan cita-cita mulia bangsa tersebut.

Selama ini, saat jamaah telah terdaftar dalam kelompok atau groupnya dan telah ditentukan jadwal keberangkatannya maka pembimbing seolah berangkat mewakili kloter atau travelnya, tak ada terbersit dalam benak pembimbing atau wakilnya yang disebut muthawwif bahwa ia adalah wakil negaranya atau diplomat publik negaranya, Indonesia itu ya terlihat dari dirinya dan sopan santunnya, dan saat di asrama haji atau hendak naik pesawat juga pembimbing hanya akan fokus dengan kloter atau travelnya, bicara hanya terbatas dengan sesama mereka,

walaupun sesekali juga bicara dengan selain kelompoknya/ travelnya namun itu akan sangat jarang dan jikalau ada hanya bisa dihitungkan dengan jumlah dan angkanya.

Dan saat tiba di hotel Mekkah atau Madinah, kebiasaan yang sama akan terjadi kembali, berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sesama kelompoknya saja, mengadakan acara keagamaan atau pengajian hanya terbatas antar sesama kelompoknya saja, begitu seterusnya hingga masuk ke Arafah Mina dan Muzdalifah senantiasa hanya dengan kelompoknya saja .

Demikian juga saat ibadah besar umrah dan haji dilakukan, baik saat thawaf ataupun sa'i ataupun wuquf dan mabit di Mina Muzdalifah selalu akan bersama kelompoknya, akan sangat jarang bisa bersama dengan selain kelompoknya, sebab memang begitulah ditanamkan dari tanah air. Akhirnya terkesan memang eksklusif dan tertutup.

Cara cara seperti ini memang akan membuat jamaah lebih khusyuk dan fokus dengan ibadahnya hanya saja jika ingin ada misi negara yang besar terkait dengan politik ekonomi dan budaya yang ingin dibangun di dunia internasional, maka haruslah ada kegiatan-kegiatan bersama yang terlihat dan berdampak pada pembangunan tiga aspek besar yaitu pembangunan politik, budaya dan ekonomi bangsa di level global internasional.

Hal ini bisa difahami sebab dalam memuat seluruh undang-undang tentang ibadah haji umroh yang selalu menjadi pertimbangan adalah masalah-masalah teknis dan bukan pada bagaimana mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji umroh yang melibatkan jutaan rakyat Indonesia dengan nilai triliunan rupiah ini bisa menjadi salah satu cara pembangunan citra positif politik budaya dan ekonomi Indonesia di mata dunia internasional.

Dalam undang-undang no mor 13 tahun 2008 yang menghapus undang-undang atau peraturan sebelumnya memang sangat jelas terlihat pertimbangan pemerintah tidak untuk membangun tiga aspek pembangunan yang dimaksud namun lebih banyak memberi

peertimabngan pada masalah masalah tekhnis keamanan kenyamanan dan kepuasan jamaah, misalnya dalam pertimbangan undang undang no 13 ini disebutkan bahwa, untuk menyempurnakan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bukan menjadi pertimbangan pemerintah ibadah hajiumrah sebagai ibadah luar biasa yang bisa menjadi media pembangunan politik ekonomi dan budaya indonesia dilevel dunia internasional padahal dahulu ibadah ini mampu mengangkat martabat politik ekonomi dan budaya bangsa Indonesia dimata dunia internasional melalui para jamaah hajiumroh dan dari mereka lah pula kemerdekaan Indonesia bisa diraih.

Ada baiknya keterlibatan kementrian luar negeri dalam menyelenggarakan ibadah haji ini diaktifkan kembali sebagaimana dahulu preseiden Soekarno melalui peraturan undang-undang nomor 3 tahun 1960 menugaskan kementerian Luar negeri dan kementerian agama sebagai penyelenggara, sebab keterlibatan kementreian luar negeri bisa menjadi penguat pembangunan politik ekonomi dan budaya negara dilevel yang lebih tinggi, sehingga penyelenggaran ibadah haji tidak hanya terjebak dalam ritual agama saja yang tak bisa masuk dalam ranah memperkuat ekonomi budaya dan politik internasional.

Pasal enam dari peraturan ini juga melibatkan banyak kementerian yang tergabung dalam PANUHAD singkatan dari panitia negara untuk urusan Hadji, keterlibatan banyak instansi ini dimaksud untuk menggali banyak potensi dari penyelenggaraan ibadah haji, sebab akan sangat naif rasnaya jika ibadah yang bernilai triliunan ini tak bisa membuat Indonesia semakin baik didunia internasional, sebab sangat disayangkan pula jika hanya kementerian agama sendiri yang mengurus masalah besar dengan potensi besar dan akan sangat mampu membuat geliat politik

ekonomi dan budaya negara, karenanya tidaklah heran kemudian jika banyak negara menjadikan urusan haji dan umroh ini diurus oleh satu kementerian khusus, tidak numpang disalah satu kementerian, sebab efeknya yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan sebuah negara, seperti kementerian urusan haji di Mesir dan juga di Saudi Arabia dan mayoritas negara Islam.

Saudi Arabia sendiri kini telah mengeluarkan visi 2030 yang bertekad mengganti APBNnya tidak lagi bersandar pada produk minyak, namun banyak membuka potensi lebih pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh serta pariwisata halal yang kini telah membantu 30 persen APBN diambil dari keuntungan haji dan umroh serta pariwisata halal.

Indonesia sangat bisa memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini sebagai media membangkitkan politik ekonomi dan budaya negara dan itu telah terbukti pada masa awal kemerdekaan yang memanfaatkan haji umroh sebagai media memperkuat pembangunan ekonomi dan budaya negara.

Ada banyak potensi ekonomi, penguatan budaya dan penguatan politik yang bisa didapati dari pelaksanaan ibadah haji umroh ini, sebab sejarah Indonesia telah mencatat bahwa jamaah yang paling banyak mendatangi kota suci Makkah dan Madinah adalah jamaah Indonesia yang terkenal dengan ramah tamahnya, terkenal dengan sabarnya, terkenal dengan tukang belanjanya, terkenal dengan senyuman ramahnya, namun jika potensi-potensi ini tidak dilipatgandakan dan dikoordinasi, maka pelaksanaan ibadah haji dan umroh akan selalu disibukkan dengan urusan teknis yang memang tak akan pernah selesai, sebab setiap tahun jamaah selalu baru, tidak kenal medan dan sulit berkomunikasi, sebaik apapun fasilitas yang diberikan, akan senantiasa ada masalah yang muncul, ini bukan berarti meminimalkan pelayanan, saat ini sudah sangat bagus, hanya tak bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga terkesan ibadah haji selalu carut marut, banyak yang meninggal, banyak yang kena

tipu dan banyak yang dituduh radikal dll.

Peraturan atau undang-undang hajiumroh yang ada jangan sampai menjebak bangsa ini lelah mengurus urusan teknis lalu lupa dengan masalah esensi dan nilai-nilai besar, ada banyak nilai besar dan lebih esensi yang bisa digali dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini, jadikan potensi-potensi haji umroh ini untuk pembangunan politik ekonomi dan budaya Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat dilevel dunia internasional .

BAB IV

POTENSI-POTENSI DAN EMPAT CARA MERAH KEUNTUNGAN EKONOMI, POLITIK DAN BUDAYA DARI PENYELENGGARAN HAJIUMROH

A. Potensi-potensi keuntungan ekonomi, politik dan budaya

Saudi Arabia sebagai tuan rumah penyelenggaraan ibadah haji umroh telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari ritual ibadah ini, tanpa promosi mahal, tanpa iklan yang berbiaya tinggi, selalu menjadi negara yang banyak dikunjungi, baik untuk beribadah, menimba ilmu pengetahuan ataupun berbisnis, Saudi juga menjelma menjadi negara yang dihormati didunia islam dengan adanya dua kota suci Mekkah dan Madinah, ditambah lagi dengan keuntungan-keuntungan ekonomi yang sangat tinggi, dalam satu musim pelaksanaan ibadah haji saja Saudi berhasil meraup keuntungan sekitar 9 milyar dollar atau sekitar 900 triliun rupiah, itu belum termasuk pelaksanaan umroh yang keuntungannya bisa berlipat lagi, karenanya Saudi selalu menjadikan penyelenggaraan ibadah haji umroh dengan serius, mengerahkan kemampuan terbaik untuk memberikan layanan prima kepada para tamu Allah, dua kota Suci diperlebar, ber-AC 24 jam, imam-imam terbaik dengan suara menenangkan nan merdu, juga membuat kementerian khusus haji umroh yang berdiri sendiri mengelola urusan haji umroh secara maksimal.

Apalagi ditengah menurunnya harga minyak dunia, kini Saudi Arabia mengeluarkan rencana besar yang tergambar dalam visi 2030 yang berusaha keras bertekad mengisi APBN nya yang selama ini melalui produksi minyak, akan diubah APBN diambil dari keuntungan penyelenggaraan ibadah haji umroh dan wisata rohani lainnya yang masih belum dimaksimalkan seperti daerah Thaif, Abha, Madain Shalih dan lainnya.

Indonesia juga mendapat keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji umroh ini, setiap tahunnya pemerintah mengelola sekitar 10 triliun rupiah dari para calon jamaah yang berangkat tahun itu, belum lagi dana abadi umat yang besarnya bisa mencapai 2000-an triliun rupiah, dari keuntungan bagi hasilnya saja sudah berapa milyar yang didapatkan, sebuah ibadah yang disiapkan Allah disamping tempat mengesakan Allah juga untuk mencari rizki dan keuntungan keuntungan dunia yang dihalalkan.

Indonesia selalu masuk dalam negara dengan jumlah terbesar jamaah haji dan umrohnya, jamaah haji tahun 2017 ini saja, pemerintah Saudi Arabia memberikan 220-an ribu lebih visa haji, belum termasuk visa umroh yang dilaksanakan diluar bulan-bulan haji yang jumlahnya lebih dari satu juta visa umroh, dengan jumlah yang sangat besar ini maka ada banyak potensi keuntungan pemerintah Indonesia yang belum dioptimalkan dengan baik, selama ini pelaksanaan ibadah hajiumroh terjebak dengan teknis dan belum mampu menjadikannya sebagai episentrum yang mendatangkan keuntungan politik internasional Indonesia, juga ekonomi dan budaya Indonesia. Jika ibadah haji umrah ini diibaratkan ibadah sholat, maka saat ini aturan mengenai sholat lebih pada aturan gerakan-gerakan yang nampak mulai dari takbiratul ihram hingga salam, namun sholat belum bisa dijadikan sebagai sarana pembentukan moral masyarakat selanjutnya dari pembentukan moral terbentuklah kekuatan-kekuatan budaya dan kekuatan ekonomi dan politik.

Secara politik internasional ibadah haji umroh belum dijadikan sebagai ajang penunjukan keberpihakan terhadap dunia islam, politik luar negeri Indonesia dengan second track diplomasinya, pemerintah harus mendorong sipil societynya untuk menjadi diplomat-diplomat publik menyatakan keberpihakannya terhadap politik dunia islam yang lebih kuat, tentu tidak harus memihak pada salah satu gerakan didunia islam, namun dorongan dari masyarakat Indonesia untuk gerakan damai dunia bisa dimulai dari konferensi masyarakat Indonesia di Arafah tentu diluar tanggal pelaksanaan ibadah wuquf.

Perjalanan ibadah hajiumroh jamaah Indonesia belum mampu membangun prespektif global yaitu bagaimana menjadikan pelaksanaannya memberi efek pembangunan positif politik internasional Indonesia, pembangunan efek positif budaya Indonesia pada dunia internasional, serta pembangunan potensi ekonomi negara walau yang terakhir ini sudah lebih dari cukup mampu memberikan efek politik nasional namun masih ada potensi lain yang sangat mungkin mampu memberi yang lebih positif bagi ekonomi negara.

Pemerintah dengan peraturan yang ada terlihat sangat fokus pada teknis yang sangat menguras energi dan waktu, setiap tahun harus sibuk menentukan berapa besar biaya naik haji, masalah kegagalan keberangkatan jamaah akibat ditipu oleh agen penyelenggara dan banyak masalah teknis lainnya,

Adapun porsi mempersiapkan ibadah haji umroh untuk menggali tiga potensi besar yaitu pembangunan citra politik Internasional Indonesia, pembangunan citra budaya Indonesia serta

penggalan potensi ekonomi lainnya dalam ibadah ini masih sangat minim, seperti misalnya hingga dewasa ini lebih dari 600 muthawwif lokal yang berasal dari Indonesia belum bisa dioptimalkan menjadi kekuatan pembangunan citra positif politik Indonesia, budaya dan ekonomi Indonesia, para muthawwif ini dibiarkan bekerja sendiri tanpa ada pelibatan mereka dalam membangun tiga potensi diatas.

Belum lagi jumlah pembimbing haji umroh yang jumlahnya ratusan, belum bisa dikoordinir menjadi kekuatan diplomasi publik negara untuk membangun tiga pembangunan diatas yaitu pembangunan citra politik negara di level internasional, pembangunan citra budaya Indonesia dilevel dunia dan pencarian potensi ekonomi selain ongkos naik haji jamaah, belum lagi terkait visa para muthawwif yang sangat riskan bermasalah dengan pemerintah Saudi Arabia namun jika mereka dioptimalkan maka akan menjadi penguat citra positif politik dan budaya Indonesia yang akan semakin baik.

Secara ekonomi pasar-pasar Saudi Arabia terutama Makkah Madinah dan Jeddah belum dimasuki oleh produk-produk Indonesia, selama ini Indonesia hanya menjadi konsumen dunia dan belum mampu menjadi produsen, juga potensi daerah yang harus dioptimalkan melalui ibadah haji dan umroh, jamaah haji dan umrah itu berasal dari seluruh daerah di Indonesia bisa dijadikan sebagai pengenalan potensi daerah masing masing .

Barang-barang Indonesia juga sangat minim masuk diSaudi, sebagian besar barang atau oleh-oleh yang ada sebagian besar datang dari China yang secara ideologi tak memiliki ikatan yang kuat dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, secara hukum fikih memang sah berinteraksi dengan non muslim, namun akan lebih baik jika potensi ini diberikan kesempatan pertama kali kepada sesama muslim.

Pembukaan cabang-cabang perbankan nasional juga menjadi potensi yang harus digarap, hampir setiap hari ada ratusan jamaah umrah dan ribuan jamaah haji indonesia saat musim haji kesulitan mencari perbankan nasional baik untuk menggunakan ATM, kartu kredit ataupun untuk transaksi keuangan lainnya, ada memang bank lokal yang bekerja sama dengan bank nasional, namun tetap saja masih belum familiar karena menggunakan bahasa arab dan inggris dalam operasionalnya, yang itu masih banyak belum diterima secara familiar oleh masyarakat Indonesia.

Juga ada potensi pembangunan hotel atau apartemen penginapan di Makkah atau di Madinah menggunakan dana abadi umat, agar jamaah haji Indonesia saat melaksanakan ibadah

haji martabatnya terangkat karena diberi fasilitas penginapan yang lebih dekat dan lebih baik dari yang sekarang diberikan, dengan melibatkan diplomasi tingkat tinggi antara government to government agar diberi izin membangun penginapan dilokasi yang lebih dekat dengan dua masjid masjid nabawi dan masjidil haram. Karena selama ini jamaah haji Indonesia biasa tinggal sekilo hingga dua kilo meter dari masjidil haram dan masjid nabawi dan itu membuat jamaah haji indonesia terlihat banyak dikasihani oleh negara lain, karena jamaah haji Indonesia banyak yang berusia tua terdiri dari kakek nenek dan itu membuat martabat Indonesia jadi tidak positif. Jika potensi pembangunan apartemen atau hotel ini bisa disetujui dengan model konsorium dengan perusahaan Saudi maka itu adalah lompatan besar dalam melayani jamaah haji umrah yang akan memberi efek positif bagi pembangunan politik sosial ekonomi nasional Indonesia dilevel global.

Ada juga potensi pembukaan rumah makan-rumah makan Indonesia yang jamaah merasa kesulitan dimana mencari makanan ala lidah Indonesia, saat ini ada dua rumah makan Indonesia yaitu di Mekkah satu di Tower Zam Zam dan di Madinah Satu dibelakang hotel Aqiq Millenium, namun itu sangat ramai dan padat dan belum menggambarkan cita rasa Indonesia, jika potensi ini bisa digali maka akan ada sumber sumber ekonomi yang bisa diambil oleh pemerintah ataupun masyarakat Indonesia.

Indonesia bisa membuat sebuah perusahaan hajiumrah untuk menampung para pekerja Indonesia yang berkaitan dengan ibadah haji Indonesia sebab selama ini banyak terjadi masalah visa dengan negara Saudi dikarenakan visa para muthawwif dan pekerja haji umrah lainnya menggunakan visa sopir pribadi atau visa lainnya selain visa resmi yang dikeluarkan oleh pementah kerajaan Saudi Arabia, pendirian perusahaan khusus hajiumroh juga potensi yang bisa dilakukan Indonesia untuk lebih baik lagi penanganan pelayanan untuk jamaah haji dan umrah.

Potensi penerbangan juga sangat terbuka, Garuda baru membuka beberapa penerbangan langsung ke Madinah yang merupakan destinasi pavorit jamaah, jika bisa penerbangan langsung Madinah bisa diperbanyak sebab banyak jamaah yang menginginkan perjalanan langsung ke Madinah agar bisa beristirahat bebrapa hari lalu kemudian baru melakukan ibadah umroh, akan membuat jamaah lebih fresh dan lebih menentramkan dibanding jika harus langsung ke Jeddah dan langsung melaksakan ibadah umrah, maka jamaah akan merasakan kelelahan yang sangat berat, dan Garuda lebih banyak langsung ke Jeddah dari pada langsung Madinah.

Sopir Bus jamaah haji dan umroh juga adalah potensi yang sangat bagus, sebab selama ini sopir sopir Indonesia selalu menjadi pavorit jamaah namun mereka belum bisa terlindungi

secara pengganjian, jika pemerintah bisa memberi mereka pendampingan serta pelatihan diplomat publik maka itu akan menjadi daya tarik Indonesia didunia internasional.

Secara budaya Indonesia dikenal dengan santun sopan dan akhlaq yang mulia, seharusnya ini dikelola dengan baik dan menjadi bagian dari potensi pengenalan budaya dilevel internasioanl, membuat event “hadiah Indonesia untuk dunia” yang mampu mengumpulkan ribuan orang dengan mempersembahkan acara memberikan hadiah kepada jamaah non Indonesia, akan membuat budaya Indonesia menjadi dikenal lebih baik. Atau membuatkan makanan khas Indonesia lalu memberi berbuka puasa bersama untuk para jamaah yang sedang melakukan ibadah puasa sunnah, maka juga akan menjadi potensi pengenalan kuliner Indonesia dimata dunia Internasional.

Ibadah haji umrah adalah ibadah yang akan tetap dijamin ketersedian jamaahnya di tanah suci, sebab dalam sejarah perjalanan ibadah hajiumrah, jamaah haji umrah selalu tetap ramai, karenanya resiko bisnis ibadah hajiumroh ini sangat kecil jika dihitung secara hukum dagang, orang yang telah datang melaksanakan ibadah hajiumrah akan ketagihan ingin datang kembali untuk melaksanakan ibadah haji umrah berulang kali, inilah bedanya dengan destinasi lain, seseorang yang pernah ke Eropa atau Amerika, maka untuk kunjungan kedua atau ketiga kalinya akan merasa bosan, namun berbeda dengan kunjungan kedatangan ke Mekkah Madinah, seseorang akan merasa ketagihan ingin selalu datang lagi dan lagi karena ada kepuasan spritual yang terpenuhi yang itu tak ditemukan di destinasi selain dua kota suci Mekkah dan Madinah, ini yang memang telah dijelaskan dalam banyak kitab suci agama.

Karenanya potensi-potensi ekonomi politik dan budaya ini harus terus ditumbuhkan dan disosialisasikan agar tetap menjadi bagian dari kebiasaan dari tahun ketahun dan kemudian menjadi citra positif Indonesia yang akan tetap selalu diingat dan dikenang, dan dari citra ini kemudian akan tumbuh pembangunan budaya politik dan ekonomi yang baik dan akan terus menjadi bagian dari perjalanan haji jamaah haji indonesia.

Menggali potensi selain ibadah dalam ibadah haji tidak hanya dilakukan satu negara, Saudi Arabi juga kini mulai menggali potensi potensi bisnis dari perjalanan ibadah haji umrah ini, ini terlihat dari banyak aspek, pertama, Saudi kini memperlebar cakupan wilayah kunjungan yang memegang visa umrah, kalau selama ini pemegang visa umrah hanya boleh mengunjungi tiga kota saja yaitu Mekkah Madinah dan Jeddah, kini Saudi membolehkan pemegang visa haji berkunjung ke kota kota wisata religi seperti Thaif dan Madain, dan dengan dibolehkannya

berkunjung ke kota wisata religi ini maka ada banyak keuntungan ekonomi yang didapat Saudi.

Kedua, Saudi juga mulai berfikir tidak menggunakan minyak lagi sebagai sumber deviasanya dan mulai melihat pada potensi keuntungan haji umrah, karena visi 2030 Saudi menargetkan 30 juta jamaah haji umrah dalam setahun, dan visi Saudi 2030 ini bisa menjadi potensi baru bagi Indonesia, sebab akan banyak memotong antrean haji reguler Indonesia yang kini bisa menunggu hingga 40 tahunan, itu artinya akan ada sekitar 3 kali lipat visa haji yang akan dikeluarkan Saudi Arabia menuju visi 2030 ini, dan berefek pada pengelolaan dana setiap tahun akan menjadi sekitar 30 triliun pertahun yang akan dikelola pemerintah.

Ketiga, Saudi juga menggunakan Masjid Nabawi dan Masjidil haram untuk mewujudkan citra politik negaranya didunia internasional, melalui ceramah, khubah jumat, dan doa-doa saat ibadah jumat dengan menyebut raja Saudi sebagai raja yang baik dan keharusan rakyat Saudi mentaati pemimpinnya, juga terhadap masalah politik luar negeri Saudi diSuriah, di Yaman dan di Qatar, hampir semua imam dan khatib jumatnya selalu membangun citra politik luar negerinya dengan sangat lembut dan halus.

Dalam setiap doa dan khutbah para khatib selalu menunjukkan keberpihakannya terhadap kebijakan raja baik itu masalah Suriah, Masalah Yaman dan juga masalah Qatar yang baru berkembang menjadi masalah serius di negara-negara teluk, jika Saudi saja memanfaatkan potensi hajiumrah untuk membangun prespektif positif politik budaya dan ekonominya didunia internasional, maka sangat wajar bila Indonesia juga kemudian harus bisa melihat celah potensi hajiumrah ini untuk membangun citra positif politik budaya dan ekonomi dilevel dunia internasional.

Sebab dari zaman nabi hingga penerusnya, seperti Umar dan Abu Bakar, Ibadah hajiumroh selu digunakan untuk membangun prespektif positif bagi pembangunan politik ekonomi dan budaya sebuah negara, dahulu Umar Bin Khattab selalu menunggu musim haji untuk menyelesaikan masalah umat, seperti pembangunan masjid di Mesir masjid Amru bin Ash juga tak lepas dari penyelenggaraan ibadah hajiumrah.

Karenanya pemerintah Indonesia seharusnya merasa terlambat jika ibadah hajiumrah ini hanya mampu menyelesaikan masalah tekhnis dan tidak mampu memanfaatkan potensi besar ekonomi politik dan budaya dari ibadah kalisik yang berhasil mengumpulkan dana triliunan pertahunnya, jika potensi ini berhasil dikembamgkan maka akan sangat mungkin negara lain juga akan mengikuti terobosan Indonsia yang pandai melihat potensi potensi politik ekonomi dan

budaya dari pelaksanaan ibadah haji umrah ini.

Karenanya perlu strategi dan ide-ide besar untuk menjadikan potensi ini menjadi realita dan tak akan mampu hanya bisa diselesaikan oleh kementerian agama sendiri, butuh kementerian lain terlibat memberi ide dan masukan agar potensi besar ini mampu direalisasikan dalam kerja nyata dan kerja besar, kementerian agama akan sangat sibuk dengan urusan teknis yang memang selalu menimbulkan masalah dari tahun ketahun, tahun ini masalahnya ini dan tahun yang akan datang masalah akan pindah ke b padahal sistem sama dan cara pengoperasionalan sistem sudah sesuai standar, itu karena jamaah yang berbeda-beda dari tahun ketahun dan akan membuat masalah memang selalu muncul walau sistem telah diperbaiki, sebab yang dihadapi adalah manusia dan bukan mesin atau alat.

Negara-negara Islam lainnya telah lama memantau potensi politik ekonomi budaya negaranya dalam pelaksanaan ibadah haji umrah ini, karenanya diperhotelkan bintang empat terutama di daerah Makkah itu banyak hotel yang dikelola oleh orang-orang Bangladesh dan Pakistan dan dari pengelolaan ini mereka membangun dan mengoptimalkan potensi ekonomi politik dan budaya negaranya.

Saudi Arabia memang menganut sistem subsidi properti semua properti dan perusahaan di Saudi termasuk di Makkah dan Madinah haruslah atas nama orang Saudi asli sehingga memang sangat berat membangun perusahaan swasta Indonesia, karenanya cara menyiasatinya adalah dengan masuknya negara dalam membantu warganya jika dalam diplomasi dikenal dengan first track diplomasi dan second track diplomasi, maka pemerintah Indonesia bisa menggunakan second track diplomasi untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa dikembangkan baik itu potensi ekonomi politik dan budaya.

Biarlah masyarakat dalam hal ini jamaah Indonesia yang maju sebagai wakil Indonesia namun sisi dinasnya akan sangat banyak dibantu oleh pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas berdiplomasi, sebab tetap saja diplomasi itu awalnya memang kewenangan pemerintah dalam hal ini Kemenlu namun keterlibatan masyarakat dalam membangun negara juga tak bisa dihindari, banyak hal yang dilakukan oleh warga negara untuk menjadikan citra positif negaranya menjadi lebih baik lebih bermartabat dan lebih dipandang negara lain.

Potensi lain yang bisa dioptimalkan adalah keberadaan mahasiswa Indonesia di Islamic University di Madinah Al-Munawwarah dan Ummul Quro University di Makkah Al-Mukarramah, ada tiga hal yang bisa dilakukan para pelajar Indonesia di negara Saudi ini untuk

mengoptimalkan pembangunan citra positif politik ekonomi dan budaya Indonesia, pertama, membentuk opini publik tentang masyarakat dan negara Indonesia yang positif dengan didasi terlebih dahulu dengan kajian ilmiah yang menguatkan pembentukan opini tersebut seperti membangun opini Indonesia itu negara islam yang sangat agamis, lalu para pelajar ini membuat kajian ilmiah yang menguatkan steten ini lalu para pelajar ini membantu menyebarkannya melalui media cetak atau elektronik, selama ini para pelajar Indonesia yang belajar di Saudi lebih suka melihat sisi negatif negaranya ketimbang sisi [positif, dan dari kajian ini pemerintah bisa bekerja sama dengan para pelajar untuk membentuk citra positif tadi .

Kedua, para mahasiswa yang ditugaskan mengisi kajian di masjid nabawi harus mampu menjadi perekat bagi semua masyarakat Indonesia dengan berbagai macam pikiran dan faham, tentu yang masih dalam korido ahlu sunnah wajamaah, sebab dari para pelajar inilah nanti akan muncul sikap membangun citra positif negara dan dari citra positif itulah diharapkan akan muncul pembelaan terhadap budaya dan ekonomi Nasional.

Ketiga para pelajar ini harus mampu membuka jalan bagi diplomasi publik sebab mereka akan sangat banyak berinteraksi dengan banyak orang Saudi dari level yang paling rendah hingga level yang paling tinggi para pangeran Saudi, diharapkan pembukaan jalan ke tingkat yang lebih tinggi nanti akan membuat banyak kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh termasuk ijin pendirian apartemen pemondokan, sebab Saudi itu negara dengan sistem monarki yang sangat ketat. Raja dan keturunannya adalah pengambil keputusan yang paling tinggi dan semua rakyat tunduk dengan keputusan itu.

Potensi lain yang bisa dijadikan sebagai pembentukan citra positif politik budaya dan ekonomi negara adalah para warganegara Indonesia yang telah menjadi warga negara Saudi, mereka ini adalah para pembisik efektif jika mereka dilibatkan dalam diplomasi publik untuk pembangunan citra positif Indonesia maka akan sangat efektif dan bernilai, sebab mereka banyak memegang informasi penting yang bisa dijadikan referensi bagi pemerintah untuk menyusun strategi membentuk citra Indonesia.

Potensi potensi luar biasa dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini jika dilakukan dengan cara yang efektif, melibatkan publik dalam mewujudkannya serta tertata baik dan dikoordinasikan dengan banyak pihak bukan sesuatu yang mustahil akan mampu membuat geliat ekonomi politik dan budaya Indonesia akan semakin positif dimata dunia internasional, perlu cara-cara yang efektif dan efisien mengoptimalkan potensi ekonomi budaya dan politik

jamaah haji umrah ini.

Jika masa penjajahan dahulu pelaksanaan ibadah haji dan umroh mampu membuat citra positif tentang Indonesia di mata Internasional maka bukalah sesuatu yang mustahil jika kini pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini bisa memberi efek positif bagi ekonomi budaya dan ekonomi Indonesia, bagi orang Arab Indonesia itu spesial karenanya jangan biarkan citra Indonesia rusak hanya karena tidak pandai mengelola penyelenggaraan ibadah haji umroh, ada banyak potensi luar biasa yang bisa dikelola dengan baik, jamaah Indonesia jangan diberi pemahaman yang salah, haji itu tak boleh mengeluh walau diberi penginapan 3-5 kilo dari Masjidil Haram, seharusnya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan hingga jamaah bisa tinggal dekat dengan Masjidil Haram.

Mari fahamkan jamaah Indonesia bahwa haji tidak hanya sebatas wuquf di arafah, mabit di Mina dan Muzdalifah serta thawaf di Kabah, haji itu pembangunan mental dan fisik, haji itu urusan akhirat dan juga dunia, haji itu masalah agama dan negara dan haji itu simbol cinta tanah air dan negara.

Saat manasik di tanah air, jamaah harus sudah difahamkan tentang masalah esensi haji umrah, bahwa nabi saat berhaji tidak hanya bicara ibadah namun ia berpidato tentang pembangunan dunia, beliau berbicara tentang kesamaan ras dan derajat, semua manusia itu sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya, haji itu pemahaman tentang tak boleh satu negara menzalimi negara lain, mengejek satu dengan yang lainnya, namun semua manusia itu bersaudara semua negara dan kabilah itu bersahabat dan bertetangga baik.

Hakikat-hakikat inilah yang jarang disebut dan ditanamkan kepada jamaah haji, haji itu kaitannya dengan dunia internasional, haji itu kaitannya dengan bersatunya banyak ras dalam satu negara, haji itu kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan, karenanya jamaah setelah mendapatkan dan menunaikan secara sempurna ibadah hajinya, haruslah diajak berfikir tentang bagaimana membangun negaranya, berfikir tentang membangun citra positif budaya ekonomi dan politik negaranya, dan nilai ini salah satu yang hilang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh setelah era kemerdekaan, dahulu nilai ini begitu kuat dan ketat diamalkan, karenanya para jamaah haji dan umroh disamping menunaikan ibadah rukun Islam yang terakhir, ia selalu membawa nama Indonesia, bercerita tentang Indonesia yang sedang dalam penjajahan kolonial Belanda, bercerita tentang negara Islam terbesar penduduk muslimnya, negara Islam paling ujung dan jauh jaraknya dengan kota suci Mekkah Madinah .

Karenanya pemahaman orang dahulu sangat kuat mengmalkan agamanya, namun tidak hilang spirit cinta negaranya, jamaah haji tetap melekat dalam dirinya keinginan bagaimana menjadikan Indonesia harus lebih baik, lebih bagus dan lebih beradab, itulah sebabnya dari jamaah hajilah banyak terjadi perubahan besar, pandangan negara-negara besar terhadap Indonesia, dari jamaah hajiumrohlah informasi tentang Indonesia yang utuh didapatkan, dan dari jamaah haji umrohlah orang mengerti bagaimana Indonesia itu bersopan santun.

Potensi-potensi inilah yang harus terus disuarakan agar pelaksanaan ibadah haji ini tidak hanya sekedar ritual ibadah semata, padahal ada jutaan potensi yang bisa dikembangkan negara untuk membangun ekonomi politik dan budaya Indonesia yang lebih bermartabat di level dunia Internasional.

B. Empat cara meraih keuntungan ekonomi, politik dan budaya

Banyak negara-negara islam menjadikan pelaksanaa ibadah haji umroh sebagai cara memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, politik dan budaya negaranya, dari pelaksanaan ibadah ini, negaranya menjadi negara yang tumbuh ekonominya, citra politik internasional negaranya juga tetap terjaga dengan baik di level internasional, dan ada banyak keuntungan lain lagi yang diperoleh dari pelaksanaan ibadah haji umrah ini.

Saudi Arabia, Qatar, Emirat, Mesir bahkan Bangladesh memanfaatkan haji umroh sebagai potensi besar untuk menggali keuntungan-keuntungan bisnis dan juga politik, sebab telah dijelaskan dalam bab tiga akan potensi besar dari pelaksanaan ibadah haji umrah ini yang akan sangat disayangkan jika potensi itu tidak dimaksimalkan dengan baik, pendapatan bisa lebih banyak dari sekarang, citra politik Indonesia bisa lebih baik dari yang sekarang didapatkan dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa dioptimalkan.

Karenanya haruslah ada strategi khusus yang dibuat pemerintah agar potensi ekonomi budaya dan politik itu bisa didapatkan, diantara potensi-potensi itu adalah dengan melibatkan warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji umrah, terlibat sebagai duta atau diplomat publik yang akan mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi bangsa.

Harus ada sinergi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya, pemerintah memberikan penanaman-penanaman nilai dan tujuan, rakyatlah nanti yang mengimplementasikan nilai itu dalam aksi nyata saat melaksanakan ibadah haji dan umrah berlangsung, ada banyak momen yang bisa digunakan, saat pelaksanaan ibadah haji umrah seperti saat di Arafah, saat di Uhud Madinah dan beberapa tempat lain yang bisa digali potensi demi meraih keuntungan-keuntungan tersebut.

Ada empat cara yang bisa dilakukan oleh Indonesia agar benar-benar pelaksanaan ibadah haji umrah ini mampu mendatangkan keuntungan-keuntungan yang dimaksud, namun sebelum empat cara ini diutarakan, ada dua hal penting yang harus diubah persepsinya tentang pelaksanaan ibadah hajiumrah.

Pertama, ibadah haji umrah adalah ibadah yang melibatkan rakyat dengan jumlah yang sangat besar dan massif, karenanya potensi besar yang ada dalam ibadah ini sangat tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan dan mengikutsertakan rakyat, rakyatlah sebagai ujung tombak kesuksesan, menjadikan potensi berbuah keuntungan-keuntungan, pelibatan rakyat dalam proyek pemerintah inilah yang disebut dengan diplomasi publik, yaitu keikutsertaan rakyat dalam mewujudkan nilai dan tujuan besar pemerintah.

Kedua, harus ada kesadaran pemerintah bahwa mengurus ibadah haji umroh ini tidak bisa ditangani oleh sebuah Direktorat, terlalu besar pekerjaan dan potensi yang ada didalamnya, jika hanya diurus oleh Direktorat maka ia akan menjadi pekerjaan sampingan dan akhirnya terjebak dalam urusan-urusan teknis semata, sementara potensi besar lainnya tak akan pernah bisa dioptimalkan, padahal jika diperas lagi, maka akan ada keuntungan-keuntungan yang berlipat lipatan yang bisa didapatkan dari ibadah hajiumrah ini.

Kebersamaan inilah nanti yang kemudian akan ditunjukkan dalam sebuah event tahunan jamaah haji Indonesia di Mekkah atau di Madinah, menggunakan sebuah jargon tentang suara Indonesia untuk dunia, didalamnya banyak keterlibatan publik, baik itu dari unsur pembimbing dan muthawwif, juga dari unsur tokoh masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah haji umrah, juga dari publik figure dan kaum cendekiawan yang sedang berada di tanah suci.

Dari event suara Indonesia (Nida' Indonesia) untuk dunia inilah menjadi pemantik yang akan mendatangkan banyak orang, dari tokoh-tokoh Saudi dan dunia dan dari event inilah

kemudian potensi-potensi keuntungan itu tergali, potensi politik, ekonomi dan juga budaya islam Indonesia yang semakin positif didunia internasional.

Jika dua point ini sudah menjadi pemahaman bersama, baik pemerintah maupun rakyat, maka akan ada usaha-usaha bersama yang bisa dikerjakan, dan paling tidak ada empat cara yang bisa dilakukan Indonesia agar potensi-potensi yang disebut dalam bab tiga diatas, bisa menjadi keuntungan yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia, dan keempat cara itua adalah sebagai berikut ini :

1. Diplomasi Publik Mursyid and Muthawwif

Pembimbing atau Mursyid dan juga Muthawwif atau Guide adalah dua orang yang paling sibuk saat jamaah Indonesia melaksanakan ibadah Hajiumrah, hampir semua ibadah dan kegiatan ditanah suci tak bisa lepas dari dua orang ini, jamaah yang ingin melaksanakan ibadah dengan tenang maka pembimbinglah tempat mengadu, bertanya dan berdiskusi, demikian juga dengan Muthawwif atau Guide juga orang yang paling sibuk saat jamaah melaksanakan ibadah, sebab Guide akan selalu diminta informasi tentang situasi, lokasi dan tempat-tempat ditanah suci.

Semua informasi tentang ibadah hajiumrah, serta tentang kondisi dan lokasi tanah suci akan sangat bergantung dari dua orang ini, informasi yang salah tentang kondisi tanah suci dari para muthawwif, akan berakibat salah faham juga dari para jamaah hajiumrah Indonesia, karenanya keterlibatan mereka, akan menyambung suara pemerintah menjadi sangat efektif, dan itulah mengapa mereka kemudian akan menjadi ujung tombak diplomasi publik menyuarakan Indonesia kedunia.

Hampir semua Muthawwif dan pemimbing fasih berbicara bahasa arab, karenanya jika ada warga negara lain bertanya serta berdiskusi tentang wajah Indonesia, biasanya mereka akan

menjelaskannya dengan sangat fasih dan sangat mudah difahami warga negara lain, hanya saja memang potensi mereka saat ini masih dikesampingkan, tak banyak yang memahami tentang urgensi mereka dalam menginformasikan Indonesia ke dunia ditanah suci, karenanya jika potensi potensi pembimbing dan muthawwif ini bisa dioptimalkan, maka akan muncul sikap dunia islam yang semakin positive kepada Indonesia, apalagi kemudian jika mereka diberikan pelatihan-pelatihan tentang keindonesiaan dengan cara yang lebih intensif, maka akan sangat mungkin mengasihkan penggalian potensi keuntungan dari ibadah hajiumrah yang akan lebih baik lagi.

Jumlah mereka sekarang lebih dari lima ratus orang, jika jumlah mereka yang sangat banyak ini secara masif menyuarakan Indonesia, yang dimulai dari melaksanakan event tentang suara Indonesia untuk dunia, lalu mereka menjadi ujung tombak informasi Indonesia ke dunia, maka persepsi politik budaya Indonesia akan terlihat semakin positif dan semakin baik.

Permasalahan muthawwif yang selama ini mereka keluhkan adalah mengenai keberpihakan Indonesia dalam menjamin visa mereka, sebab mereka ini adalah orang-orang yang memiliki visa bukan visa pekerja untuk ibadah ditanah suci, namun mereka ini adalah para pekerja yang umumnya para sopir pribadi dari orang-orang Saudi, lalu mereka mengadakan kesepakatan dengan majikannya, tidak akan bekerja pada mereka, namun dengan membayar sejumlah uang tertentu pada majikan, dan mereka bebas bekerja dimanapun yang mereka sukai, umumnya memang mereka bekerja di hajiumrah sebagai guide .

Masalah yang selama ini muncul dari mereka adalah, mereka tidak dioptimalkan dengan baik, mereka hanya sebatas petugas, menjelaskan ritual ibadah saja, namun mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam bagaimana membangun persepsi Indonesia dengan lebih baik dan lebih positif baik terhadap warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara asing.

2. Diplomasi publik kaum cendekiawan

Hampir setiap tahun Saudi Arabia menerima mahasiswa baru dari Indonesia, dan jumlah mereka hampir 200 orang setiap tahun yang sukses lulus masuk di Islamic University di Madinah Al Munwwaroh, para mahasiswa ini senantiasa bolak balik masjid Nabawi lalu ke kampus mereka, mereka bisa menyelesaikan kuliah dari 4-7 tahun, selama tahun itu mereka akan terus bolak balik masjid Nabawi, karenanya potensi mereka menjadi diplomat publik sangatlah potensial, apalagi mereka adalah para cendekiawan yang memiliki bahasa arab yang baik dan bagus, serta mereka adalah orang-orang yang berhasil lulus seleksi dari ribuan calon peserta yang telah mendaftar.

Apalagi kemudian diantara para mahasiswa ini, dan biasanya para senior mereka, selalu diberi kesempatan untuk mengisi kajian rutin di masjid nabawi untuk menyampaikan tafsir atau hadist yang disampaikan khusus untuk masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umroh, biasanya dari jamaah haji umrah kemudian banyak pertanyaan yang muncul seputar masalah keagamaan di Indonesia, jika para mahasiswa ini dibekali dengan informasi keindonesiaan yang baik dan terstruktur, maka akan menjadi gerakan yang banyak menguntungkan Indonesia.

Mereka diberi tempat oleh pemerintah Saudi Arabia, yang tidak sembarang orang diberikan mengisi kajian-kajian keislaman di masjid nabawi, bahkan seorang tokoh nasional saja saat berada di tanah suci belum tentu diberi kesempatan mengisi kajian keislaman di masjid nabawi, mereka-mereka ini adalah orang yang memiliki relasi yang baik dengan ulama dan kaum cendekiawan Saudi Arabia, khususnya ulama dan kaum cendekiawan di kota Madinah Al Munwwaroh, lewat mereka perspektif Indonesia serta penggalian potensi ekonomi budaya bisa dioptimalkan.

Dan biasanya para mahasiswa ini selalu ditawarkan oleh orang-orang Saudi untuk berbisnis dan usaha patungan bersama, karenanya informasi dari mereka tentang Indonesia akan ditelan mentah-mentah oleh yang mendengarnya, pemerintah Indonesia bisa mengaktifkan diplomasi publik mereka untuk mewujudkan optimalisasi potensi hajiumrah yang dilakukan jamaah Indonesia.

Jika saja ada pertemuan rutin dengan para mahasiswa ini, membahas tentang potensi-potensi Indonesia dari pelaksanaan ibadah hajiumrah, maka akan muncul sebuah rencana-rencana terstruktur, bagaimana meraih tujuan besar dari pelaksanaan ibadah ini bisa tercapai, mereka bisa menjadi diplomat publik Indonesia yang baik, hanya saja mereka membutuhkan pendampingan dan penguatan-pengutan dari pemerintah terutama tentang nilai dan tujuan-tujuan Indonesia yang ingin dicapai dari pelaksanaan ibadah hajiumrah ini.

Para mahasiswa ini juga tak putus hubungannya dengan para cendikiawan Saudi setelah mereka menyelesaikan studi mereka di Madinah, biasanya hubungan mereka akan berlanjut hingga mereka saling mengundang untuk mengisi kajian-kajian keislaman, baik di Indonesia ataupun di Saudi, dan dari hubungan baik ini kemudian akan berlanjut pada investasi-investasi yang dikembangkan bersama, baik ditanah suci ataupun ditanah air, karenanya mahasiswa yang memiliki hubungan baik dengan dosen atau ulama Saudi Arabia, haruslah menjadi diplomat publik Indonesia yang akan menyuarakan Indonesia untuk bisa menggali potensi-potensi ekonomi budaya dan politik Indonesia dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Banyak cerita nyata yang didapati oleh jamaah hajiumroh yang bertemu dengan para mahasiswa Indonesia ditanah suci yang kemudian kini para mahasiswa itu memiliki hubungan bisnis yang baik dengan orang-orang Saudi, kemudian mereka juga menyebut tentang senior-senior mereka yang memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh Saudi yang jika semua relasi

itu dioptimalkan, akan semakin membuat daya pacu optimalisasi ibadah haji umrah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi budaya dan politik internasional Indonesia dimata dunia internasional bisa terwujud dengan optimal.

3. Diplomasi publik tokoh dan masyarakat dan publik figure

Hampir setiap keberangkatan haji umrah selalu ada tokoh masyarakat ataupun publik figur yang ikut serta melaksanakan atau menuaikan ibadah haji umrah, mereka biasanya terdiri dari artis, tokoh ilmuwan, tokoh masyarakat, kyai da'i ataupun para tokoh Indonesia umumnya, ditanah suci mereka biasanya akan menjadi daya tarik, apalagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat mengagumi figuritas, dan biasanya mereka disana senantiasa ramai dikerumuni orang, biasanya hanya untuk menyapa, mengucapkan salam ataupun untuk minta foto bersama.

Dari interaksi itu biasanya akan muncul dari jamaah luar negeri pertanyaan tentang siapa tokoh yang dimasud dan dari interaksi itu pula biasanya akan berkembang diskusi mengenai kehidupan ditanah air, lalu selanjutnya berkembang menjadi hubungan relasi, jika para publik figure ini diamanahi menjadi duta-duta publik Indonesia, maka akan sangat membuat diplomasi publik semakin masif dan terstruktur.

Apalagi kemudian jika ada acara atau event yang mereka para tokoh ini dibuatkan acara untuk memperkenalkan Indonesia, atau mengumpulkan jamaah Indonesia lalu membuat acara kajian sekaligus amal sosial yang dimotori oleh para tokoh dan publik figure ini, itu akan membuat potensi haji umrah ini akan semakin tergali, memang membutuhkan kesabaran berinteraksi dengan mereka, sebab mereka telah menjadi orang besar, biasanya mereka akan berfikir panjang untuk menjadi duta publik negara, tanpa diberi keuntungan-keuntungan finansial untuk mereka, namun jika mencoba menawarkan

ide untuk bangsa dan negara, sepertinya keuntungan finansial akan menjadi nomor kesekian yang diperhitungkan, sebab kerja ini adalah kerja untuk negara dan bangsa, jikapun ada keuntungan finansial nanti bisa dibicarakan.

Mereka adalah sorotan jamaah Indonesia dan akan memberikan warna pada jamaah lainnya ditanah suci, jika mereka dioptimalkan maka akan menjadi potensi keuntungan ditanah suci dan hampir selalu ada tokoh dan publik figure menunaikan ibadah haji umrah setiap tahunnya.

4. Dipolamsi publik para pemilik travel dan busnisan

Mereka adalah ujung tombak berjalannya bisnis haji dan umroh, hubungan mereka dengan para pengusaha dan pejabat Saudi Arabia sangat bagus dan baik, karena memang selama ini mereka bekerja sama dengan mereka, hubungan mereka dengan maskapai penerbangan sangat bagus, hubungan mereka dengan pemilik hotel sangat kuat, hubungan mereka dengan pemilik transportasi juga begitu baik, bahkan mereka juga memiliki hubungan dengan para pejabat hingga para pangeran Saudi Arabia.

Jumlah mereka sangat banyak, sesuai dengan jumlah travel perjalanan hajiumrah yang tergabung dalam empat asosiasi haji umrah, ada Himpun yang manuangi 400-an travel perjalanan hajiumrah dan ada tiga lagi asosiasi yang menaungi biro perjalanan hajiumrah ini, mereka biasanya lebih lihai melihat potensi bisnis ibadah hajiumrah ini, dan dari mereka juga muncul ide-ide bisnis baru yang bisa dikembangkan.

Jika peran mereka dioptimalkan, lalu juga pemerintah membuka jalan buat mereka, maka akan memberi dampak yang sangat baik bagi tergalinya potensi-potensi hajiumroh, memang mereka akan membuat hitung-hitungan bisnis, karena memang mereka selama ini mencari rizki disana, namun jika mereka kemudian diberi amanah untuk menyampaikan nilai-nilai besar bangsa yang harus dijalankan ditanah suci, maka akan sangat cepat membuat masif optimalisasi ibadah haji umroh ini yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi, politik dan juga budaya Indonesia di level internasional.

Apalgi jika mereka juga dilibatkan dalam pembuatan event-event penguat optimalisasi potensi haji umrah, maka banyak pintu relasi yang bisa terbuka dengan cepat

dan itu akan menjadi percepatan bagi terwujudnya cita-cita yang ingin dicapai .

Itulah empat diplomasi publik yang bisa ditempuh Indonesia jika ingin potensi-potensi yang ada dalam ibadah hajiumrah ini bisa dioptimalisasikan menjadi kebaikan bangsa dan negara, dan memang akan sangat kecil keuntungan jika Indonesia hanya fokus mengejar keuntungan dari ongkos naik haji jamaah untuk kemudian menjadi satu satunya keuntungan dari pelaksanaan ibadah hajiumrah ini.

Ada ratusan potensi keuntungan yang bisa dioptimalkan dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini yang terfokus dalam tiga point penting yaitu politik internasional Indonesia, ekonomi dan budaya Indonesia dan sekali lagi sudah banyak negara yang sudah berusaha mengoptimalkan keuntungan dari ibadah haji umrah ini.

Saudi arabia adalah salah satu contohnya, kini Saudi membangun citra positif politik luar negerinya saat musim haji tiba, para khatib dan imamnya akan menyerukan suara yang kuat tentang politik luar negeri kerajaan, akan disampaikan dalam khutbah, do`a dan pamplet-pamplet spanduk, begitu juga tentang budaya Saudi yang semakin terlihat dari penjualan baju jubah ataupun abaya, juga dari budaya makan minum akan tersebar dengan sangat masif dalam penyelenggaraan ibadah hajiumrah ini.

Apalagi keuntungan ekonomi, sudah tak terhitung lagi keuntungan yang didapat pemerintah dan rakyat Saudi dari pelaksanaan ibadah hajiumrah, dan oleh karena mereka begitu serius dan konsen menyiapkan pelaksanaan ibadah menjadi yang terbaik dan terbagus bahkan yang tersukses.

BAB V

KESIMPULAN

Dahulu, pada zaman perebutan kemerdekaan Indonesia, ibadah haji dan umrah memiliki peran yang sangat urgent dalam meraih kemerdekaan, banyak para haji Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan, bahkan detik-detik akhir saat memperoleh kemerdekaan bangsa, ibadah hajiumrah memegang peran yang sangat penting, ini ditandai dengan pemerintah darurat Indonesia yang bertekad tetap mengutus misi haji khusus yang terdiri dari empat tokoh yaitu KRH. M. Adnan, H. Ismail Banda, H. Salih Suaidy dan H. Samsir Sutan Ameh, untuk menemui raja Saudi Arabia dan sekaligus untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan.

Melalui perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya keempat jamaah haji inipun bisa tiba di Saudi Arabia, lalu menemui raja Saudi Arabia sekaligus berhasil mendapat dukungan penuh Saudi dan negara-negara Arab akan pengakuan kemerdekaan Indonesia, keempat tokoh ini juga sukses melaksanakan ibadah haji sambil membawa bendera merah putih, dan saat di padang Arafah pada tahun 1948 itulah, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan dihadapan puluhan ribu jamaah haji seluruh dunia.

Secara budaya dan pencitraan kultur Indonesia, ibadah haji umrah juga berhasil membawa citra negara menjadi harum, jamaah haji Indonesia telah banyak mengharumkan nama baik nusantara, itu terlihat dari kiprah para jamaah haji yang bermuqim lama di Mekkah dan Madinah dan berhasil menjadi orang-orang yang terhormat dan disegani, sebut misalnya Syekh Arsyad Al-Banjari (1710-1812) yang terkenal sebagai ahli fikih dari Kalimantan dan telah menulis buku fikih perukunan melayu yang telah menjadi buku rujukan orang melayu dalam bidang fikih lebih dari 200 tahun lamanya.

Ada juga Syekh Juned Al-Betawi, dahulu seorang jamaah haji Indonesia yang kemudian bermuqim di Mekkah lalu terkenal sebagai ulama ahli tauhid dan telah menulis buku *Hidayatus Shalihin* berbahasa arab. H. Aqib Suminto dalam disertasinya yang berjudul politik islam Hindia Belanda, menyebut istri syekh yang bernama Siti Rahmah, menjadi panggilan jamaah haji wanita Indonesia saat itu hingga kini, semua itu sebagai penghormatan masyarakat Saudi Arabia atas keshalihan dan kewibawaan syekh Juned Al Betawi.

Ada juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, seorang jamaah haji yang kemudian bermukim, karena kemahirannya dalam bidang agama, beliau ditunjuk menjadi imam masjidil

Haram serta pengajar tetap di sana, dari beliauah Ahmad Dahlan belajar agama, dan dari beliau juga Abdul Karim Amrullah (ayahanda Hamka) dan Ismail Djambek belajar islam dan pergerakan.

Namun dewasa ini, penyelenggaraan haji umrah cenderung hanya terbatas dengan ritual ibadah saja plus sibuk memperbaiki kuota yang sulit sekali ditambah, dan ibadah haji umrah tak lagi banyak mampu memberi efek positif politik internasional Indonesia, efek ekonomi serta budaya Indonesia ditingkat internasional yang menguntungkan diplomasi bangsa, padahal jumlah jamaah haji Indonesia dan juga umrohnya selalu yang menjadi terbesar dan teratas dari seluruh dunia.

Jika ingin mengoptimalkam potensi hajiumrah, maka ada empat diplomasi publik yang harus ditempuh dan dioptimalkan yaitu diplomasi publik Mursyid dan Muthawwif, diplomasi publik kaum cedikiawan, diplomasi publik tokoh dan public figur dan terakhir diplomasi publik pemilik travel dan bussnisman.

Daftar Pustaka:

1. Politik Islam Hindia Belanda, Aqib Suminto, IAIN, Jakarta, 1985.
2. Diplomasi Revolusi Indonesia diluar negeri, M. Zein Hassan, Lc, Bulan bintang, Jakarta, 1980.
3. Jurnal Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri, Citra Hennida, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.
4. C. Snouck Hurgronje dan Politik Belanda terhadap Islam dan keturunan Arab, Hamid Algadri, Sinar Harapan, 1984.
5. Berhaji dimasa kolonial, Dr. M. Dien, CV Sejahtera, Jakarta, 2008.
6. Historiografi Haji Indonesia, Dr. M. Shaleh Patuhena, LKIS, Yogyakarta, 2007.
7. Kiai Haji Mas Mansur 1896-1946 perjuangan dan pemikiran, Darul Aqsha, Erlangga,
8. Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong, Remaja Rosda press, Bandung, 2006
9. Metode Penelitian Kualitatif, . Conny R. Semiawan, Grasindo press, Jakarta, 2000.
10. Studi Kasus Desain dan Metode, Robert K. Yin, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
11. Diplomasi publik dalam politik luar negeri, Citra Hennida, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.